

IV. GAMBARAN UMUM KECAMATAN BABADAN

A. Kondisi Fisik dan Geografis Kecamatan Babadan

Kecamatan Babadan merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Babadan terdiri dari 12 desa dan 3 kelurahan yang dibedakan berdasarkan letaknya yaitu desa yang letaknya mendekati daerah kota dan desa yang berada di daerah desa atau jauh dari kota. Desa yang terletak dengan daerah perkotaan yaitu Desa Cekok, Desa Gupolo, Desa Polorejo, Desa Ngunut, Desa Bareng, Desa Babadan, Kelurahan Kertosari, Kelurahan Patihan Wetan dan Kelurahan Kadipaten. Sementara, desa yang letaknya jauh dari kota yaitu Desa Japan, Desa Sukosari, Desa Lembah, Desa Pondok, Desa Purwosari dan Desa Trisono. Kelurahan Kertosari, Patihan Wetan dan Kadipaten dibagi menjadi 127 rukun warga (RW), 482 rukun tetangga (RT) dan 55 lingkungan atau dusun.

Luas wilayah Kecamatan Babadan menurut penggunaannya yaitu sebesar 4.293 km², di mana luas lahan untuk lahan sawah sebesar 3.342 km² dan lahan bukan pertanian sebesar 1.689 km². Letak geografis untuk wilayah Ponorogo yaitu 111°17'-111°52' BT dan 7°49'- 8°20' LS. Wilayah Kecamatan Babadan terletak pada ketinggian antara 150 m sampai dengan 199 m di atas permukaan laut dengan batas-batas Kecamatan Babadan yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten madiun, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jenangan, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Sukorejo dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan ponorogo (Dinas Kabupaten Ponorogo, 2015). Berikut ini pada tabel 2 luas wilayah Kecamatan Babadan berdasarkan penggunaan luas lahannya.

Tabel 2. Merupakan Data Luas Wilayah Kecamatan Babadan Menurut Kelurahan/ Desa Berdasarkan Penggunaan Lahan Per Hektar

Kelurahan/ Desa	Penggunaan Lahan		Luas Keseluruhan
	Pertanian	Non Pertanian	
1 Kertosari	96.69	70.43	167.12
2 Cekok	130.14	31.6	161.74
3 Patihan wetan	168.28	45.94	214.22
4 Kadipaten	240.65	128.25	368.9
5 Japan	179.93	57.79	237.72
6 Gupolo	91.79	33.88	125.67
7 Polorejo	276.19	712.4	348.59
8 Bareng	94.25	36.58	130.83
9 Ngunut	279.82	85.75	365.97
10 Sukosari	366.58	84.41	452.99
11 Lembah	329.16	96.31	425.47
12 Pondok	147.44	42.74	190.18
13 Babadan	271.71	90.17	261.88
14 Purwosari	308.28	73.33	381.61
15 Trisono	361.13	99.79	460.92
Jumlah	3342.04	1689.37	4293.81

Sumber Data : Kantor Camat Babadan 2015

Desa Lembah memiliki luas wilayah dengan penggunaan lahan sebesar 425,47 Ha dan berdasarkan penggunaan lahannya, wilayah tersebut dibedakan menjadi dua yaitu sebagai lahan pertanian dan non pertanian. Lahan yang digunakan untuk pertanian sebesar 329,16 Ha dan non pertanian sebesar 96,31. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan lahan didominasi oleh lahan untuk pertanian. Adapun batas-batas wilayah Desa Lembah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Trisono, sebelah timur berbatasan dengan Desa Purwosari dan Desa Pondo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Polorejo dan sebelah selatan Polorejo.

Begitu pula dengan Desa Trisono. Desa Trisono memiliki luas wilayah sebesar 460,92 Ha dan berdasarkan penggunaan lahannya, wilayah tersebut dibedakan menjadi dua yaitu sebagai lahan pertanian dan non pertanian. Lahan

yang digunakan sebagai lahan pertanian sebesar 361,13 Ha dan non pertanian sebesar 99,79 Ha. Desa Trisono memiliki perbedaan luas wilayah yang sedikit lebih banyak dari pada Desa Lembah, namun untuk kondisi wilayah di kedua desa tersebut tidak jauh berbeda. Batas-batas wilayah Desa Trisono yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kali Asin dan Kabupaten Madiun, sebelah timur berbatasan dengan Desa Purwosari, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukosari dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lembah.

B. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk di Kecamatan Babadan sebesar 70.619 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 35.094 jiwa dan perempuan sebesar 35.525 jiwa yang tersebar di seluruh desa yang ada di Kecamatan Babadan. Adapun jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan di desa yang dijadikan sebagai lokasi adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Merupakan Data Jumlah Penduduk di Desa Lembah dan Desa Trisono

Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Lembah	2.926	3.049	5.975
Trisono	2.675	2.698	5.373

Sumber : Kantor Camat Babadan 2015

Desa Lembah memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dari pada di Desa Trisono. Selisih jumlah penduduk dari kedua desa tersebut kurang lebih sebanyak 602 orang. Penduduk yang berjenis kelamin perempuan di Desa Lembah sedikit lebih tinggi dari pada jumlah penduduk yang berjenis laki-laki, sedangkan di Desa Trisono jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan merata atau tidak memiliki selisih yang cukup banyak.

Mayoritas penduduk di Kecamatan Babadan beragama Islam. Jenis pekerjaannya pun bermacam-macam, yaitu bertani, menjadi tenaga kerja luar negeri, wiraswasta dan pegawai negeri. Namun, jenis pekerjaan yang mendominasi adalah petani, alasannya walaupun pegawai sebagai pekerjaan utamanya, tetapi petani dijadikan sebagai pekerjaan sampingan karena sebagian besar masyarakat di desa masih mengandalkan sektor pertanian untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

C. Pertanian

Luas lahan yang digunakan pada sektor pertanian di Kecamatan Babadan mencakup beberapa macam komoditas tanaman pangan, seperti tanaman padi, jagung dan kedele. Hasil produksi dari ketiga komoditas tersebut tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Ponorogo. Adapun data produksi komoditas tanaman pangan yang mencakup tanaman padi, jagung dan kedelai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. Data Komoditas Tanaman Pangan Kecamatan Babadan

Nama Desa	Luas Tanam			Produksi Ton/Ha		
	Padi	Jagung	Kedele	Padi	Jagung	Kedelai
Purwosari	761	37	12	7,7	8,4	2,1
Trisono	844	40	13	7,7	8,4	2,1
Polorejo	685	37	12	7,35	8,4	2,1
Patihan Wetan	315	31	12	6,3	8,4	1,7
Lembah	805	29	8	7,35	8,4	2,1
Kadipaten	501	35	23	6,65	7,7	2,4
Babadan	549	41	22	7	8,05	2,1
Pondok	310	35	13	7,35	7,7	1,75
Bareng	222	24	5	6,3	7,7	2,1
Cekok	248	32	12	6,65	8,4	1,7
Japan	391	35	13	6,65	8,05	2,1
Kertosari	173	27	12	6,65	7,7	1,4
Sukosari	540	38	13	7	8,4	1,75
Jumlah	6344	441	170	90,65	105,7	25,4

Sumber Data : Kantor Camat Babadan 2015

Meningkatnya luas area tanam untuk tanaman pangan akan berdampak pula terhadap meningkatnya kebutuhan pupuk di tingkat petani. Terlebih lagi petani membutuhkan pupuk dalam jumlah yang relatif lebih tinggi dalam pemenuhan kebutuhan untuk usahatani yang dijalankan. Petani beranggapan bahwa dengan memberikan pupuk dalam jumlah yang relatif lebih tinggi akan meningkatkan produktivitas tanaman atau usahatani. Sementara, kebutuhan pupuk di tingkat petani sangat terbatas, khususnya untuk pupuk bersubsidi. Jika ketersediaan pupuk subsidi terbatas dan petani tetap menggunakan pupuk dalam jumlah yang banyak maka hal tersebut akan berdampak pada kelangkaan pupuk bersubsidi sehingga untuk alternatif pemenuhannya petani harus membeli dan menggunakan pupuk non subsidi. Padahal pupuk non subsidi dijual dengan harga yang lebih tinggi sehingga petani yang merasa kekurangan untuk memenuhi kebutuhan pupuk dalam usahatani yang dilakukan, maka pemenuhan pupuknya dengan menggunakan pupuk non subsidi.

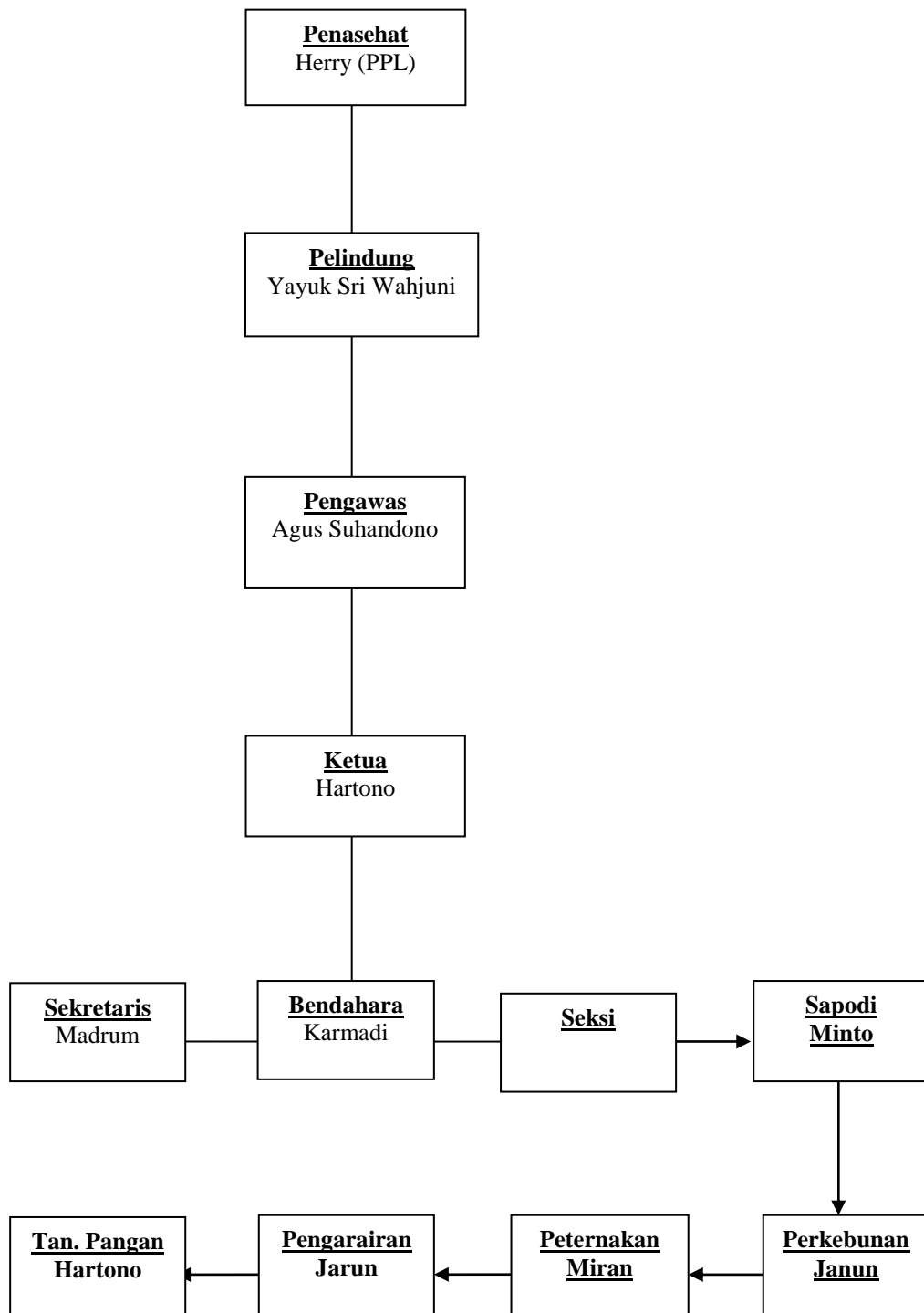
D. Kelembagaan Kelompok Tani

Desa Lembah dan Desa Trisono merupakan desa yang digunakan untuk lokasi penelitian. Di kedua desa tersebut terdapat kelompok tani yaitu kelompok tani “Mukti Tani” yang berasal dari Desa Lembah dan kelompok tani “Tani Jaya” yang berasal dari Desa Trisono. Adapun struktur organisasi dari masing-masing kelompok tani akan dijelaskan pada bagan dibawah ini.

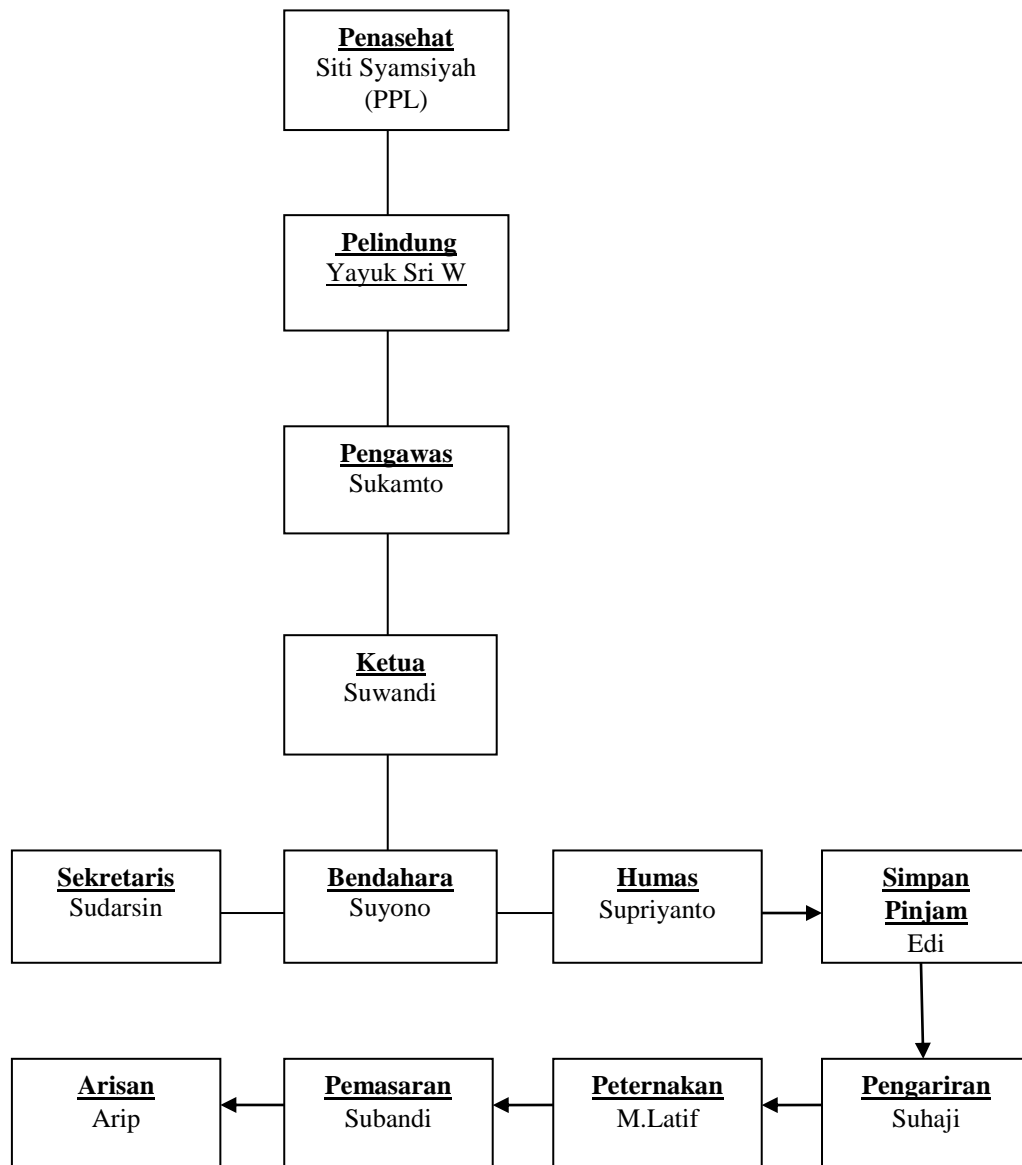
Struktur organisasi pada kelompok tani di Desa Lembah dan di Desa Trisono tidak jauh berbeda karena susunan kelembagaan pada kelompok tani tersebut dimulai dari penasehat, pelindung, pengawas, ketua, sekretaris dan

bendahara. Selain itu, juga terdapat beberapa seksi-seksi yang mengemban tugas yang berbeda-beda. Di Desa Lembah, ada beberapa anggota kelompok tani yang menjabat sebagai seksi-seksi tertentu, seperti seksi sarana dan produksi, pengairan, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, humas serta PHT, sedangkan di Desa Trisono beberapa anggota kelompok tani juga menjabat sebagai seksi humas, simpan pinjam, PHT, pengolahan tanah, pengairan, peternakan, pemasaran dan arisan.

Struktur organisasi kelompok tani “Tani Jaya” di Desa Trisono memiliki sistem organisasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan struktur organisasi pada kelompok tani di Desa Lembah “Mukti Tani”. Hal ini disebabkan oleh, setiap seksi-seksi yang diberikan tanggung jawab untuk mengemban tugas dapat melaksanakan tugas dengan baik dan transparan. Selain itu, sistem administrasi yang digunakan juga sangat baik sehingga semua proses administrasi dapat diterima oleh seluruh anggota dengan jelas. Jika di kelompok tani “Mukti Tani” struktur organisasinya kurang baik, misalnya masalah pembukuan kurang transparan dan daftar hadir anggota tidak berjalan dengan baik sehingga tugas dari seksi-seksi yang diberikan amanat kurang menjalankan tugas dengan maksimal. Adapun struktur organisasi pada kelompok tani “Mukti Tani” dan kelompok tani “Tani Jaya” adalah sebagai berikut.



Gambar 2. Struktur Organisasi Kelompok Tani Desa Lembah "Mukti Tani"



Gambar 3. Struktur Organisasi Kelompok Tani Desa Trisono "Tani Jaya"

E. Gambaran Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

Kelangkaan pupuk bersubsidi merupakan keadaan ketika petani mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang disalurkan ke petani melalui kios daerah atau melalui kelompok tani untuk menunjang usahatani yang dijalankan oleh petani dan terbatas jumlahnya.

Selain terbatas jumlahnya, pupuk bersubsidi dipasarkan dengan harga yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan harga pupuk non subsidi. Oleh karena itu, petani sangat terbantu dengan adanya pupuk bersubsidi.

Di sisi lain, dengan adanya pupuk bersubsidi, petani akan memenuhi semua kebutuhan tanaman padi dengan menggunakan pupuk bersubsidi. Hal tersebut juga didukung dengan harga pupuk subsidi yang relatif lebih terjangkau daripada pupuk non subsidi sehingga akan sangat memudahkan petani untuk membelinya. Sementara itu, dengan harga pupuk subsidi yang relatif lebih terjangkau menyebabkan penggunaan pupuk ditingkat petani semakin meningkat atau melebihi dosis dari rekomendasi. Petani beranggapan bahwa dengan memberikan pupuk dalam jumlah yang lebih banyak akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi pula. Jika petani terus menggunakan pupuk secara berlebihan, maka jumlah kebutuhan pupuk yang disediakan oleh pemerintah akan mengalami kekurangan sehingga petani akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk karena pemakaian di tingkat petani belum sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Selain itu, dengan penggunaan pupuk yang berlebihan dapat menyebabkan struktur tanah menjadi berkurang nutrisinya dan dalam jangka waktu tertentu hasil produksi dari usahatani yang digarap oleh petani akan menurun hasilnya. Berikut ini tabel 5 merupakan data kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2015 yang ada di Kabupaten Ponorogo.

Tabel 5. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 di Kabupaten Ponorogo

Pupuk	Kebutuhan Pupuk Berdasarkan RDKK	Alokasi Pupuk Bersubsidi Sesuai Pemerintah	Kekurangan Pupuk Sesuai RDKK
Urea	45,370 Ton	27,007 Ton	18,363 Ton
ZA	26,544 Ton	16,238 Ton	10,307 Ton
SP-36	26,312 Ton	6,885 Ton	19,427 Ton
NPK	34,856 Ton	26,539 Ton	8,317 Ton
Organik	31,943 Ton	19,456 Ton	12,487 Ton

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo 2015

Berdasarkan tabel diatas, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan oleh petani sangat tinggi, sedangkan untuk alokasi pupuk yang diterima oleh petani terbatas. Sebagian besar permintaan pupuk urea, ZA, SP-36, NPK dan organik oleh petani juga sangat tinggi dan alokasi permintaan pupuk yang diterima oleh petani hampir setengah dari RDKK yang diajukan. Sehingga kekurangan dari permintaan pupuk yang diajukan sesuai dengan RDKK tersebut dapat dipenuhi dengan penggunaan pupuk lain, yaitu selain pupuk bersubsidi.

Dalam pemenuhan kebutuhan pupuk, setiap kelompok tani pada masing-masing desa atau daerah memiliki kebijakan atau Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk anggota kelompok tani. Sehingga jumlah pupuk yang diterima akan disesuaikan dengan luas lahan yang dimiliki oleh setiap petani. Pupuk disalurkan ke petani melalui kelompok tani dan petani yang mengambil atau membeli harus menyelesaikan administrasi terlebih dahulu. Selain itu, ada juga bentuk penyaluran pupuk yang tidak melalui kelompok tani, sehingga petani langsung mengambil pada kios resmi di wilayah tersebut. Berikut ini pada tabel 6 merupakan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan di Kabupaten Ponorogo.

Tabel 6. Proses Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Ponorogo Tahun 2015

KEGIATAN	Dokumen yang Dihasilkan
PENYALURAN	
Ketua Poktan menyampaikan kebutuhan pupuk kelompoknya kepada Petugas	Rekap kebutuhan Poktan
Koord. PPL menyampaikan daftar kebutuhan pupuk se kecamatan kepada distributor	Surat Breakdown pupuk ke distributor
Distributor menyalurkan pupuk kepada kios sesuai dengan breakdown PPL	Bukti penyaluran pupuk oleh distributor
Kios menginformasikan kepada ketua poktan dan PPL pupuk sudah sampai di kios	Rekap pupuk yang telah diterima oleh kios
Penebusan pupuk oleh distributor ke Produsen	Harus ada Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Dinas Indakop yang dilampiri RDKK
Kios wajib menyalurkan pupuk ke petani/poktan sesuai dengan RDKK	Nota penjualan ke poktan/petani
Kios wajib memasang papan nama dan wilayah kerja	Nama desa, kecamatan
Jika penyaluran ke petani melalui poktan/gapoktan maka:	
a. Poktan/Gapoktan wajib memiliki penyaluran ke petani	a. Buku catatan penyaluran pupuk oleh poktan/gapoktan ke petani
b. Kios wajib memiliki bukti penyaluran ke Poktan	b. Bukti nota penyaluran pupuk oleh kios kepada poktan/gapoktan
Jika kios menyalurkan pupuk kepada petani, maka:	
a. Poktan/gapoktan wajib memiliki alat kontrol sehingga seluruh anggota tercukupi kebutuhannya	a. Kartu/ketak petani yang dikeluarkan oleh poktan yang erisi jatah pupuk per musim per tahun dan jumlah yang diterima
b. Kios wajib memiliki bukti penyaluran kepada petani	b. Buku catatan penjualan oleh kios ke petani

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo 2015

Menurut data dari Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo tahun 2015, untuk dosis penggunaan pupuk untuk komoditas tanaman padi sebaiknya disesuaikan dengan anjuran yang telah ditentukan. Dosis anjuran penggunaan pupuk sudah dikonversi dalam satuan per hektar sehingga dosis penggunaan akan sangat

memudahkan bagi petani. Tabel berikut merupakan tabel dosis penggunaan pupuk per hektar komoditas tanaman padi.

Tabel 7. Dosis Penggunaan Pupuk Per Hektar Direkomendasikan di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Komoditas	Jenis Pupuk	Dosis Anjuran Kg/Ha	Dosis Petani Kg/Ha	Selisih Kg/ha
Padi	Urea	250	350	+100
	ZA	150	175	+25
	SP-36	75	175	+100
	Phonska	200	300	+100
	Petroganik	500	700	+200

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo 2015

Berdasarkan tabel 7, dosis penggunaan pupuk yang dilakukan oleh petani dalam usahatani padi sangatlah tinggi. Penggunaan dosis ditingkat petani melebihi dosis anjuran penggunaan pupuk untuk tanaman padi. Setiap jenis pupuk yaitu untuk jenis pupuk urea, SP-36, NPK dan pupuk organik masing-masing mengalami kenaikan dosis dengan selisih kenaikan yang hampir sama yaitu antara 100 – 200 kg, kecuali untuk jenis pupuk ZA. Selisih kenaikan pupuk jenis ZA tidak melebihi 100 kg, tetapi hanya seperempatnya yaitu 25 kg per hektar.

F. Distribusi Pupuk Di Desa Lembah dan Desa Trisono

Proses penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani merupakan hal yang sangat penting atau dapat diartikan sebagai proses penyaluran yang membutuhkan pengawasan yang sangat ketat. Hal ini bertujuan agar jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan oleh pemerintah dapat diterima oleh petani sesuai dengan kebutuhan masing-masing petani karena jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi disesuaikan dengan luas lahan garapan petani dan tentunya dengan dosis anjuran dari pemerintah. Tidak sedikit pula jumlah pupuk bersubsidi yang diterima petani

tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan petani sehingga menyebabkan kekurangan jumlah pupuk bersubsidi.

Penyebab kekurangan dari pupuk subsidi antara lain, alokasi pupuk bersubsidi yang diterima petani belum sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang pengecer memahami bahwa pupuk yang mereka salurkan merupakan barang dalam pengawasan. Kemudian, belum semua petani terdaftar dalam anggota kelompok tani, penggunaan pupuk di tingkat petani melebihi dosis anjuran pupuk dan pemupukan. Selain itu, administrasi pelayanan pupuk di kios pengecer kurang tertib termasuk di tingkat kelompok tani dan pembinaan dan pengawalan penyusunan RDKK perlu ditingkatkan. Hal tersebut perlu ditingkatkan supaya penyaluran pupuk bersubsidi ke petani dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Berikut ini merupakan proses penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Lembah dan Desa Trisono.

Tabel 8. Distribusi Pupuk Bersubsidi di Desa Lembah dan Desa Trisono

Desa	Proses Penyaluran
Lembah	Distributor → Kios daerah → Petani
Trisono	Distributor → Kios daerah → Kelompok tani → Petani

Sumber Data : Data Primer 2016.

Penyaluran pupuk ke petani yang dilakukan di Desa Lembah dan Desa Trisono dengan metode 5:3:2 atau sering disebut dengan penggunaan pupuk secara berimbang, namun lebih dikenal petani dengan istilah pupuk paketan. Penggunaan pupuk berimbang 5:3:2 artinya dalam satu hektar menggunakan 5 kwintal pupuk Organik (12 sak), 3 kwintal NPK (6 sak) dan 2 kwintal Urea (2 sak). Namun, dalam penggunaan pupuk berimbang tidak sedikit petani yang tidak

mengikuti anjuran tersebut, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan pupuk petani akan membeli sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh tanaman, misalnya memperbanyak pupuk NPK, mengurangi pupuk organik dan sebagainya. Sehingga hal ini akan menyebabkan dampak dari penggunaan pupuk yang berlebih terhadap tanaman maupun jumlah kebutuhan pupuk.

Di Desa Trisono penyaluran pupuk dengan metode 5:3:2 tidak diberlakukan karena untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh petani agar tidak terlalu banyak. Jika pupuk dijual dengan metode tersebut maka petani yang memiliki lahan yang luas tidak akan mengalami masalah, namun sebaliknya jika petani hanya memiliki lahan yang sedikit maka penjualan pupuk dengan metode tersebut akan meningkatkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh petani. Oleh karena itu, di Desa Trisono penjualan pupuk bersubsidi disesuaikan dengan luas lahan yang dimiliki oleh petani sehingga pupuk subsidi dapat diterima dengan rata ditingkat petani.